

IMPLEMENTASI PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PEMUKIMAN WILAYAH KELURAHAN (PM-PIK) DI DAERAH HINTERLAND KOTA BATAM

Novia Dwi Aristi¹, Nurhayati, Muhammad Solihin³

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

novia.aristi@gmail.com

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

nurhayati@fisip.unrika.ac.id

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

sm10rome@gmail.com

Abstrak

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Masalah infrastruktur yang dihadapi adalah masih kurangnya infrastruktur dasar yang ada di Kota Batam dan masih belum selesainya pusat pemerintahan Kota Batam. Permasalahan infrastruktur ini perlu di tanggulangi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara wilayah Kabupaten/Kota dalam hal ketersediaan infrastruktur. Sedangkan permasalahan yang ada dilapangan penyediaan infrastruktur yang dihadapi adalah belum selesainya pemerataan Pembangunan Infrastruktur fisik seperti Pembangunan jalan, pembangunan pelantar beton dan batu miring di pantai serta pembukaan akses terhadap daerah terluar atau pulau-pulau yang ada di Kecamatan Bulang. Peneliti merumuskan yaitu Bagaimana Implementasi Pembangunan Infrastruktur di Daerah Hiterland Kota Batam (Studi Penelitian Kecamatan Bulang) Tahun 2017-2018.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur, hinterland.

Abstrack

Infrastructure development is part of national development. National development is an effort made as a step to develop Indonesian people. The infrastructure problems faced are the lack of basic infrastructure in Batam City and the completion of the Batam City government center. This infrastructure problem needs to be addressed to overcome the development gap between the Regency / City area in terms of infrastructure availability. While the problem in the field of infrastructure provision faced is the unfinished development of physical infrastructure such as road construction, construction of concrete slabs and sloping stones on the beach and opening access to the outermost areas or islands in the Bulang District. The researcher formulated the How to Implement Infrastructure Development in the Hiterland Region of Batam City (Bulang District Research Study) for 2017-2018..

Keywords: Policy Implementation, Development, Infrastructure, hinterland.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Indonesia memiliki ribuan pulau yang mencapai 17.499 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai adalah 81.900 km². Sebagian besar pulau di Indonesia atau sekitar 87,64% merupakan pulau-pulau kecil dan tidak atau belum berpenghuni. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Adapun implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 21) adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Winarno (2014: 147) menjelaskan Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Kawasan Batam terdiri dari pulau-pulau dengan ukuran atau luasan yang berbeda-beda dengan pulau pusat pertumbuhan yang berada di Pulau Batam. Kota Batam memiliki satu pulau besar, yaitu Pulau Batam dan 329 pulau berpenghuni yang berada di wilayah Kota Batam. Perkembangan pusat 2 pertumbuhan pada suatu mainland seharusnya dapat memengaruhi perkembangan pada daerah sekitarnya. Pengertian daerah/wilayah disini mencakup daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, masing-masing sebagai daerah otonom". Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengembangan wilayah pada daerah Batam, yaitu pada karena saat ini wilayah *hiterland* sedang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam untuk dikembangkan. Adapun pengkhususan pelayanan koridor Jalan publik yang diambil adalah jenis pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2009-2029. Peran yang dilaksanakan oleh pusat pertumbuhan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah latarnya atau hinterland. Perkembangan dan pertumbuhan mainland juga dapat dipengaruhi dari adanya hubungan dengan daerah latarnya karena terciptanya

saling memengaruhi antar wilayah untuk perkembangan dan kemajuan masing-masing kawasan.

Perbedaan kondisi pada kecamatan hinterland kepulauan di Kota Batam menjadikan adanya perbedaan yang menghubungkan pusat kota dengan pusat kecamatan. Dua kecamatan hinterland lainnya telah dihubungkan dengan adanya jembatan sehingga pergerakan menuju pusat kota dapat ditempuh melalui transportasi darat, sedangkan untuk Kecamatan Belakang Padang hanya dapat ditempuh melalui transportasi laut untuk melakukan pergerakan dari atau ke pulau pusat kota. Perbedaan ini secara langsung membuat adanya perbedaan pergerakan penduduk Kecamatan Belakang Padang dalam beraktivitas dan memenuhi kebutuhan yang seharusnya dapat melakukan pergerakan langsung menuju pusat kota.

Masalah implementasi pembangunan infrastruktur yang dihadapi adalah masih kurangnya infrastruktur dasar yang ada di Kota Batam dan masih belum selesainya pusat pemerintahan Kota Batam. Permasalahan infrastruktur ini perlu di tanggulangi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara wilayah Kabupaten/Kota dalam hal ketersediaan infrastruktur darat berupa jalan dan jembatan, infrastruktur laut berupa pelabuhan, dermaga dan kapal angkutan. Penyediaan Infrastruktur tersebut secara bertahap diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang ada di masing-masing pulau dan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Batam.

Pada laporan penelitian sebelumnya implementasi pembangunan di beberapa daerah di Indonesia khususnya ada yang berjalan optimal dan tidak. Alifa (2018) yang menjelaskan Program PM-PIK di kelurahan Sekanak Raya berjalan dengan baik. Murba (2017) juga menjelaskan implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong masih sangat terbatas. Hanye dkk (2014) Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu secara implementatif berhasil dan membawa perubahan terhadap kondisi infrastruktur di daerah tersebut. Selain itu tersedianya infrastruktur juga menurut Sutarto dan Solihin (2019) menjadi kendala dalam melakukan pembersihan sampah di Kecamatan Belakang Padang.

Dalam penelitian ini yakni wilayah *hinterland* Kota Batam khususnya kecamatan Bulang pembangunan yang terjadi masih belum merata, maka pemerintah Kota Batam berupaya melakukan pengembangan wilayah. Peneliti memfokuskan pengembangan wilayah *hinterland* tepatnya pada wilayah sepanjang daerah *hinterland*, guna mewujudkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, menyeimbangkan pembangunan wilayah Kota

Batam, dan menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat komprehensif dan holistik.

Sedangkan permasalahan yang ada dilapangan penyediaan infrastruktur yang dihadapi adalah belum selesainya pemerataan Pembangunan Infrastruktur fisik seperti Pembangunan jalan, pembangunan pelantar beton dan batu miring di pantai serta pembukaan akses terhadap daerah terluar atau pulau-pulau yang ada di Kecamatan Bulang. Melihat dari data yang pada tahun 2017-2018 rata-rata pembangunan sudah terealisasi hingga 99.82% tetapi pada kenyataannya masih sangat banyak yang belum tersentuh pembangunan dari pemerintah dan permasalahan yang sering terjadi dikawasan *hinterland* ialah kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur. Maka peneliti akan membicarakan mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Di Daerah *Hinterland* Kota Batam (Studi Penelitian Kecamatan Bulang).

METODELOGI

Penelitian kualitatif di gunakan sebagai jenis penelitian dengan analisa deskriptif. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan, masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek yang diteliti, seperti individu, lembaga, masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1992: 63). Bogdan & Taylor dalam Moleong (2007: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2011: 224). Analisis model interaktif tersebut, terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002) ada 6 (enam) indikator dalam teori nya yaitu : 1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, 2. Sumber-Sumber kebijakan, 3. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 4. Karakteristik badan-badan, 5. Sikap para pelaksana, dan yang ke 6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan bukti dan digunakan dalam mengukur sejauh mana pelaksana kebijakan mengimplementasikan kebijakan. Sehingga para pelaksana kebijakan mengerti dan paham arti dan tujuan dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan.

Tujuan adalah hasil dari sasaran yang telah dibuat dan dilakukan, sedangkan sasaran adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. PM-PIK mempunyai kekuatan hukum yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam yaitu :

Tabel 1. Peraturan Walikota Batam Tahun 2017

No	Peraturan Walikota	Nomor	Tujuan dan Sasaran
1	Peraturan Walikota Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam	Nomor 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan sehingga terwujud percepatan kualitas lingkungan yang sehat dan tertata; 2. Sasaran kegiatan Swakelola PM-PIK sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya pokjamas sebagai bentuk partisipasi langsung/ pemberdayaan masyarakat untuk menata lingkungannya masing-masing di lokasi sasaran kegiatan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan; b. Terwujudnya PSD lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman dan nyaman dengan fasilitas yang mendukung pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; c. Terciptanya stimulant kemandirian masyarakat, terutama dalam hal pembangunan/penyediaan infrastruktur di lingkungan kelurahan, dan d. Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat penerima manfaat dengan melaksanakan kegiatan swakelola.

Sumber: <https://jdih.batam.go.id/>

Pemahaman tentang maksud dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Standard dan Sasaran kebijakan mempunyai hubungan erat dengan disposisi para pelaksana.

adapun sasaran kebijakan target pembangunan yang harus pemerintah laksanakan. Dalam mengukur standard kebijakan pemerintah memiliki landasan atau aturan yang harus dilaksanakan.

Kebijakan program Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan wilayah kelurahan (PM-PIK) Kota Batam tahun 2017-2018 khususnya di Kecamatan Bulang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pemasaran serta mengurangi isolasi daerah karena akan berdampak penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan di Kecamatan dan Kelurahan.

PM-PIK mempunyai kekuatan hukum yang tertuang dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam.

Perwako Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam ini menjadi pedoman implementator dalam menjalankan pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan tujuan yang dimaksud pemerintah.

Berdasarkan wawancara bahwa pembangunan infrastruktur di kecamatan bulang sudah di atur dalam perwako kota batam. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur mempunyai landasan hukum yang jelas, yang dimana setiap kegiatannya di atur dan peraturan tersebut dari sisi anggaran dan target yang harus di capai dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bulang. Pada kegiatan pembangunan ini pihak kecamatan mempunyai prioritas dalam pembangunan yang dimana prioritas ini di dapatkan dari hasil musyawarah rembuk warga (musrenbang). Dari musrenbang inilah di dapatkan hasil lokasi daerah yang akan di bangun atau di prioritaskan.

Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan karena mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan, tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Ketersediaan sumberdaya

merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu kebijakan di pengaruhi oleh sumber daya, keberadaan sumber daya merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi, karena tanpa adanya sumber-sumber kebijakan yang sudah di buat tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam proses implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia disini adalah Pegawai yang terlibat dalam kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Bulang.

Berdasarkan wawancara dapat dilihat bahwa sumber daya manusia untuk dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bulang masih belum memiliki sumber daya dalam bidang teknis sendiri, sehingga di dalam kegiatan ini melibatkan konsultan dari pihak luar, yaitu konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dalam membantu untuk berjalan nya kegiatan ini sendiri.

Sumber daya finansial atau anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sehingga menjadi hal yang penting dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, jika anggaran kurang makan kegiatan pembangunan infrastruktur tidak berjalan efektif dan tidak maksimal. Sesuai Renstra bahwa untuk mencapai sasaran tersebut, program dan kegiatan direncanakan didanai melalui sumber pendanaan, yaitu APBD Murni dan APBD Perubahan Kota Batam Tahun 2018-2018, untuk Kecamatan Bulang yaitu sebesar adalah sebesar Rp 4,455,836,900.00 tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebesar Rp 5,558,601,000.00.

Sarana dan Prasarana adalah sumberdaya yang sangat penting dalam penunjang pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bulang. Menurut Van Meter dan Van Horn, Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau insentif lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sarana dan prasarana disini sangat penting dalam penunjang keberhasilan Implementasi Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Bulang.

Komunikasi

Konsep komunikasi pada implementasi kebijakan pada umumnya menganalisa apakah pesan yang dikirimkan komunikator kebijakan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan kebijakan. Jika pesan yang dikirimkan dapat diterima secara lengkap, maka komunikasi disebut efektif.

Adapun indikator diukur dari Sosialisasi mengenai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, Peneliti menemukan hubungan komunikasi dalam implementasi program ini dimulai ketika pihak pelaksana program melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lalu dalam pembangunan pekerjaan infrastruktur melibatkan masyarakat, masyarakat di bentuk Kelompok Kerja Masyarakat atau disingkat (POKJAMAS), Pokjamas sendiri di bentuk oleh masyarakat sendiri dari hasil musyawarah dan mufakat.

Dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur masyarakat sendirilah yang membangun kegiatan yang ada di wilayah atau tempat mereka. Kelompok yang memiliki tujuan demi membangun daerahnya itulah bergabung dan memiliki kesamaan tujuan. Oleh karna itu menurut peneliti, komunikasi antara pihak kecamatan dan masyarakat sangat penting sekali, karena melalui komunikasi dapat terciptanya hasil yang baik dan menguntungkan masyarakat di Kecamatan Bulang.

Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam pengimplemtasi pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 2 faktor yaitu faktor organisasi internal dan faktor eksternal. Organisasi formal yaitu faktor dari yang mempengaruhi kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Bulang. Organisasi formal dari kegiatan PM-PIK ini yaitu Tim Kecamatan dan Kelurahan pada dasarnya sama, kekurangan Sumber Daya Manusia dan keterbatasan daerah hinterland sendiri, yang dimana sarana/prasarana . Berikut untuk menjawab permasalahan, adapun indikator di ukur dari Faktor internal dan Faktor Eksternal berikut perhatikan jawaban wawancara.

Kebutuhan SDM serta sarana/prasarana menjadi faktor internal yang paling utama dalam Implementasi Pembangunan Infrastruktur dan juga salah satu menjadi hambatannya ialah keterbatasan daerah hinterland harus membeli bahan baku dari daerah mainland terlebih dahulu.

Kecenderungan/Sikap

Kecenderungan disini tertuju pada sikap pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan program, bila mereka mempunyai pandangan sikap yang positif maka kebijakan tersebut akan dapat dilakukan dengan baik, namun apabila sebaliknya maka tidak akan berjalan dengan efektif.

Dalam menyampaikan komunikasi sendiri kecamatan bulang menggunakan pendekatan untuk mewujudkan pendekatan dengan masyarakat. Suatu program yang dibuat oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu masyarakat berkepentingan dan perlu memperhatikan program yang diputuskan oleh pemerintahnya.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan politik

Aspek sosial masyarakat di kecamatan bulang pada umumnya merupakan masyarakat yang masih memegang teguh budaya dan menggunakan bahasa melayu. Keadaan sosial di Kecamatan Bulang sangat baik sehingga masyarakat menerima pembangunan infrastruktur yang di buat oleh Pemerintah Daerah.

Aspek ekonomi masyarakat Kecamatan Bulang, pada umumnya masyarakat kecamatan bulang mempunyai penghasilan sebagai nelayan dan berkerja sebagai karyawan, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur masyarakat tidak ada penolakan sehingga kegiatan berjalan dengan baik sehingga membuat jalur perekonomian berjalan.

Aspek politik pemerintah pembuat Perwako terkait program pembangunan infrastruktur yaitu PM-PIK, Yaitu Perwako Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam yang menjadi pedoman pemerintah dalam mengimplementasikan PM-PIK kepada masyarakat.

Dapat dilihat bahwa pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Nasrun, yaitu dari pihak pemerintah dan pihak legislatif atau pun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, dalam penggaran tidak adanya hambatan dan permasalahan, dan setiap kegiatan di dukung penuh, dikarenakan kegiatan pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh dalam mewujudkan keadilan dan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur tersebut. Dalam aspek politik pemerintah membuat Perwako terkait PM-PIK Nomor 8 Tahun 2019 tentang Program PM-PIK yang mana akan menjadi pedoman

pemerintah mengimplementasi Program PM-PIK kepada masyarakat dan masyarakat bisa memberikan evaluasi kepada pemerintah.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang Implementasi Pembangunan Infrastruktur Daerah *Hinterland* di Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun Anggaran 2017-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut : Dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan daerah hinterland di kecamatan bulang sudah berjalan namun belum sepenuhnya efektif karena masih banyak daerah yang belum dibangun di karenakan kebijakan pemerintah tentang pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat baru berjalan 2 tahun.

1. Standard dan Sasaran Kebijakan

Dalam mengukur standard kebijakan pemerintah memiliki landasan atau aturan yang harus dilaksanakan, di dalam kegiatan pembangunan infrastruktur kecamatan bulang berpedoman pada Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam.

2. Sumberdaya

Sumberdaya di Kecamatan Bulang masih kurang terutama sumberdaya manusia dalam bidang teknik dan sesuai bidang pembangunan infrastruktur, yang dimana di kecamatan bulang pada kegiatan pembangunan kegiatan masih di laksanakan oleh Staff yang tidak sesuai bidang dari kekurangan sumber daya manusia di bidang teknik kecamatan bulang menggunakan konsultan sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan. Dari segi anggaran yang ada, anggaran sudah di atur dalam peraturan walikota batam, dan anggaran pembangunan infrastruktur di daerah hinterland maupun mainland sama sehingga realisasi atau target pembangunan tidak sama di karenakan anggaran yang sama. Seharusnya pemerintah membeda antara daerah *maindland* dan *hinterland*, di karenakan biaya akomodasi lebih besar di banding daerah mainland.

3. Komunikasi

Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat itu sangat penting, karena dengan adanya komunikasi kegiatan pembangunan infrastruktur akan berjalan lancar dalam pelaksanaannya, karena melalui komunikasi lah suatu kebijakan akan dengan mudah dilaksanakan dan agar terciptanya hasil yang baik.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana/Pelaksana Program

Karakteristik badan-badan pelaksana/Pelaksana Program itu sangat penting dan menjadi salah satu indikator dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bulang, karena dukungan dalam pembangunan infrastruktur badan pelaksana dapat dukungan dari masyarakat sehingga dalam pengerjaan tidak ada kendala.

5. Kecenderungan/Sikap

Sikap pelaksana pembangunan infrastruktur di kecamatan bulang sudah baik di karenakan sikap mereka di pandang masyarakat sudah sangat baik. Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat pareto superior (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan pareto optimal (membangun mengorbankan orang lain). Hubungan dan komunikasi antar pemerintah kecamatan bulang dan masyarakat sudah sangat baik sehingga implementasi pembangunan infrastruktur berjalan dengan lancar.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi politik sangatlah penting dalam implementasi kebijakan dimana dapat kita lihat dimana lembaga legislatif sangat berpengaruh dalam penganggaran dana kegiatan dan perencanaan kegiatan. Sehingga kegiatan tersebut di sahkan dan dapat dirasakan dan dapat di realisasikan oleh pengguna anggaran dapat mewujudkan keadilan dan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, Dyra Khairunisa. (2018). *Implementasi Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) terhadap Pembangunan di Kelurahan Sekanak Raya Tahun 2017*. Skripsi
- Murba. (2017). *Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*. Skripsi.
- Hanye, Tiopillus. Adam Idris, & Aji Ratna Kusuma. (2014). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman Di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu*. *Journal Administrative Reform*. 2 (3): 1954-1966.
- Sutarto, Dendi & Solihin, Muhammad. (2019). *Implementasi Program Pengangkutan Sampah di Kecamatan Belakang Padang*. *Jurnal Dimensi*. 8 (3): 449-472.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2012). *Implemetasi Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Nawawi, Hadari. (1992). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Press.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses & Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- _____. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Medpress.